

Risma Berpeluang Menjadi Penantang Serius bagi Anies

JAKARTA (IM) - Politisi PDIP, Andreas Hugo Parcira, menilai, Menteri Sosial Tri Rismaharini berpeluang besar maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya, menantang Anies Baswedan selaku petahana.

Ia mengatakan hal itu menanggapi survei Median yang menunjukkan adanya lonjakan elektabilitas Risma di bursa Pilgub DKI Jakarta.

"Tri Rismaharini nampaknya akan menjadi penantang serius bagi Anies, apalagi kalau Risma menunjukan kinerja positif sebagai Mensos dan kemudian dicalonkan sebagai Gubernur DKI," kata Andreas, Selasa (16/2).

Ia mengatakan bahwa Risma memiliki modal memimpin daerah karena pernah menjabat Wali Kota Surabaya. Modal itu menurut dia bisa dimanfaatkan untuk memimpin Jakarta. Namun, Andreas menegaskan bahwa PDI-P belum memiliki calon tertentu yang akan diusung di pilkada DKI Jakarta, apalagi Pilkada DKI Jakarta belum akan digelar dalam waktu dekat.

Jika mengacu pada UU Pemilu saat ini, pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta

baru akan digelar pada 2024, meski masa jabatan Anies habis pada 2022.

"Pilkada DKI masih jauh," ujar anggota DPR ini. Ia meyakini dalam beberapa waktu mendatang akan muncul nama-nama lain yang berpotensi menantang Anies sebagai petahana. Apalagi berdasarkan hasil survei, elektabilitas Anies tak mencapai 50 persen.

"Kalau hasil survei inkumben 40 persen sebenarnya mengindikasikan kinerja yang buruk. Pengalaman empiris selama ini inkumben dengan hasil survei di bawah 50 persen menunjukkan bahwa pemilih tidak puas terhadap kepemimpinan dan kinerja inkumben," ujarnya.

Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) mencatat adanya lonjakan elektabilitas Tri Rismaharini di bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dalam survei terbaru yang digelar awal Februari ini, Menteri Sosial Risma dipilih oleh 23,5 persen responden. Angka itu didapat melalui survei semi terbuka dimana responden diberi 16 nama calon gubernur. ● ber

10 Ribu Pedagang di Jakarta akan Disuntik Vaksin Covid-19

BALAI KOTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta segera melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 10 ribu pedagang di 153 pasar yang ada di Ibu Kota. Program vaksinasi ini menjadi tahapan kedua setelah sebelumnya diberikan kepada tenaga kesehatan.

"DKI sudah menyiapkan data kurang lebih 10 ribu iya kan. Nanti juga yang lain-lain termasuk juga Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada teman-teman wartawan yang sementara tahap 1 kan 5.000. Itu juga akan dimulai," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (16/2).

Ia menambahkan, Pemprov DKI akan melaksanakan program vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ke-

bijakan pemerintah pusat. Prinsipnya, kata dia, faskes yang ada di Ibu Kota siap dalam melakukan vaksinasi.

"Kami menunggu saja sesuai dengan aturan dan ketentuannya, tahapan demi tahapan, kemudian juga pendataannya," ujarnya.

Ariza meminta, warga Ibu Kota untuk bersabar lantaran setiap orang akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk divaksin Covid-19 guna penyebaran virus corona bisa segera dikendalikan.

"Semua masyarakat sabar. Nanti pada waktunya akan mendapat kesempatan yang sama, tidak kurang semua warga Jakarta semuanya akan mendapatkan yang memenuhi ketentuan dan syarat yang ada," tuturnya. ● ber



FOTO/ANT

BANJIR DI KEBON JERUK

Genangan di sudut rumah warga kawasan Pesing, Kedoya Utara, Jakarta Barat, Selasa (16/2). Sejumlah titik di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tergenang air 30-50 sentimeter akibat hujan lebat sejak Selasa dini hari.

Pelantikan Idris-Imam Ditunda, Pengambilan Keputusan Terganggu?

DEPOK (IM) - Ketua DPRD Kota Depok Yusufy Putra mengaku khawatir dengan penundaan pelantikan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono sebagai wali kota-wakil wali kota terpilih periode 2021-2026 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Idris-Imam sebagai pemenang Pilkada Depok 2020 harusnya mulai bertugas besok, Rabu (17/2), bertepatan dengan tuntasnya lima tahun masa jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2016-2021, Mohammad Idris-Pradi Supriatna.

"Kami sedang pembahasan anggaran, sekarang lagi musrenbang tingkat desa," ujar Putra kepada wartawan, Selasa (16/2).

"Ini diperlukan kepala daerah. Harus ada kepala daerah yang membuat keputusan," katanya menambahkan.

Menurut kader PKS tersebut, dampak penundaan ini cukup besar karena posisi kepala daerah otomatis akan diisi sementara oleh seorang pelaksana harian (Plh).

"Kalau nanti dengan Plh, kami kan tidak bisa membuat keputusan yang strategis. Jadi terhambat pembahasan anggaran ini kalau ditunda pelantikan," ucap Putra.

Selain itu, masalah jadi rumit karena hingga sekarang, menurut Putra, DPRD Kota Depok belum menerima surat maupun tembusan

dari Kemendagri mengenai penundaan pelantikan ini.

"Kami masih melihat bahwa 17 Februari jadwal pelantikan belum ada perubahan, karena tidak surat-surat yang maksud kami berkenaan dengan penundaan itu," jelas Putra.

Ia menyayangkan sikap Kemendagri yang dianggap kurang profesional ini karena akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga pemerintahan dan eksekusi-eksekusi kebijakan.

"Kan tidak ada alasan yang prinsip terkait penundaan ini. Ini yang harus diperjelas ke kita, bahwa seharusnya kerja Kemendagri profesional, yang sudah terjadwal harusnya dijalankan," tutur Putra.

Sementara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengonfirmasi bahwa pelantikan para kepala daerah yang seharusnya mulai menjabat Februari 2021.

"Rencana dilantik akhir Februari, serentak, kecuali yang sengketyanya berlanjut di Mahkamah Konstitusi," kata Akmal. Penundaan ini ditengarai karena masih ada 132 perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Padahal, hasil Pilkada Depok 2020 tidak termasuk dalam 132 PHPU yang bergulir di MK. ● ber

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



Ratusan Keluarga Korban Covid-19 di Jakpus Belum Dapat Santunan

Syarat yang diperlukan keluarga korban Covid-19 atau ahli waris untuk mendapatkan santunan adalah memberikan surat keterangan dari rumah sakit, surat keterangan ahli waris dan nomor rekening.

JAKARTA (IM) - Sebanyak 120 keluarga korban Covid-19 di Jakarta Pusat (Jakpus) hingga saat ini belum mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial sebesar Rp15 juta per keluarga.

Kepala Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat Ngapuli Parangin-Angin mengatakan, santunan diberikan kepada keluarga yang anggotanya meninggal akibat terpapar Covid-19.

"Jadi, ini dari April tahun lalu (2020), kami sudah ajukan secara bertahap. Sampai sekarang 120 yang menjadi ahli waris korban Covid-19 itu belum dapat. Kami sudah ajukan dan sampai saat ini belum cair," kata Ngapuli, Selasa (16/2).

Syarat yang diperlukan keluarga korban Covid-19 atau ahli waris untuk mendapatkan santunan adalah memberikan data ke Sudin Sosial Jakarta Pusat berupa surat keterangan dari rumah sakit, surat keterangan ahli waris dan nomor rekening.

Akan tetapi, 120 ahli waris di Jakarta Pusat belum ada tindak lanjut dari Kementerian Sosial untuk pencairan santunan, meski sudah mengajukan sejak tahun lalu.

"Saya sudah tanya apakah masih ada atau tidak? Mereka tidak berani jawab. Itu jawaban dari Kemensos. Tapi yang penting kami sudah usaha," ujar Apul - panggilan Ngapuli.

Apul berharap ada kejelasan terkait pemberian santunan

tersebut sehingga warga yang menunggu hampir selama satu tahun itu mendapatkan kepastian.

"Saya tegaskan, karena kami yang berhubungan dengan masyarakat. Kalau memang tidak ada, tolong bilang tidak ada. Kalau memang masih ada, ya beri kepastian diberikan kapan. Karena ini masyarakat masih berharap, karena mereka sudah mengajukan, jadi butuh kepastian," tandasnya. ● osm

Wagub DKI Berharap 2 Pekan Setelah Imlek Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, optimistis dua pekan setelah Imlek tidak ada lonjakan kasus virus korona (Covid-19). Sebab menurutnya, segala persiapan dan protokol kesehatan telah ditetapkan pada hari H Imlek.

"Sekali lagi sudah kami sampaikan kepada pemuka agama Tionghoa, karena di masa pandemi ini perayaan Imlek kemarin membatasi protokol kesehatan. Saya juga berkunjung ke kelenteng-wihara juga baik protokol kesehatan. Masyarakat juga diminta tetap beribadah di rumah masing-masing dan perayaan imlek berlangsung dengan baik damai tenang," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (16/2).

Selainnya, politikus Partai Gerindra itu berharap, perayaan Imlek dapat membuka rezeki dan keberkahan kepada masyarakat.

Ariza menyebut tak ada

kerumunan di dalam tempat peribadatan. Jumlah warga yang keluar Jakarta juga tidak sebanyak saat libur panjang lainnya.

"Kemudian yang kedua, juga tidak ada kerumunan yang luar biasa di mana pun dalam perayaan Imlek, dan juga jumlah yang keluar kota menurut pemantauan juga tidak sebesar daripada lebih panjang sebelumnya. Kami juga apresiasi kepada masyarakat dan mudah-mudahan hasil daripada libur panjang Imlek ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Covid-19. Mudah-mudahan justru adanya penurunan," katanya.

Ia pun amat terus memantau penurunan angka Covid-19 dua pekan ke depan.

"Penurunan ini kita tunggu, mudah-mudahan atas kerjasama kita semua antara pemerintah membuka agama dan masyarakat semuanya kita bisa menurunkan Covid-19 di Jakarta ini," tuturnya. ● osm

Acara Ulah Rahmat Effendi Dibubarkan di Cisarua, Pemkot Bekasi Minta Maaf

JAKARTA (IM) - Polres Bogor dan Satgas Covid-19 membubarkan yang diduga pesta ulang tahun Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di salah satu villa yang berada di Kampung Baru Sireum, Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada 3 Februari 2021 lalu.

Namun Kabag Humas Setda Kota Bekasi, Sajekti Rubiah menegaskan bahwa acara tersebut bukan pesta ulang tahun, tapi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan sedikit arahnya dalam pertemuan singkat yang santai tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bekasi dilanjutkan acara ramah tamah.

"Pak Wali tidak mengundang para pemangku jabatan namun murni inisiatif pemangku jabatan," kata Sajekti kepada wartawan, Selasa (16/2).

Sajekti menegaskan bahwa kegiatan tersebut mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, disediakan tempat mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan karena ini bersifat internal Pemkot Bekasi. Apalagi, jajaran Pemerintah Kota Bekasi selesai melaksanakan kegiatan tersebut sekitar pukul 21.00 WIB dan pada pukul 21.20 WIB Camat beserta Kapolsek dan Danramil serta Satpol PP setempat telah melakukan pengecekan monitoring kegiatan tersebut dan mengimbau kegiatan dapat segera diselesaikan.

Kehadiran Camat Cisarua, Deni Humaidi dan jajaran Muspika Kecamatan Cisarua guna menindaklanjuti pengaduan warga karena ada aktifitas kegiatan tersebut yang diduga mengganggu kenyamanan warga

sekitar. "Kehadiran saya untuk menindaklanjuti aduan warga, dan pihak Pemkot Bekasi dengan baik menerima masukan kami," ungkapnya.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan permohonan maaf kepada warga dan pihak terkait di wilayah Cisarua apabila aktifitas kegiatan yang dilakukan telah mengganggu kenyamanan warga Cisarua Bogor.

"Kami segenap jajaran Pemerintah Kota Bekasi meminta maaf atas kejadian itu, dan saya pastikan tidak berkerumun dan mematuhi protokol Kesehatan," tegasnya.

Bupati Bogor Ade Yasin dalam keterangan yang diterima Senin malam (15/2) menuturkan, pesta Rahmat Effendi itu terjadi pada awal Februari lalu. Berdasarkan laporan Satgas Kecamatan Cisarua, mereka mendapatkan laporan dari warganya adanya kerumunan di sebuah vila di kawasan Puncak.

"Jadi warga melihat banyak sekali mobil terparkir dan melapor. Setelah menerima laporan, pak camat bersama satgas kecamatan membubarkan acara tersebut," kata Ade.

Kata Ade, acara itu dihadiri sekitar 20 orang. Pun dilihat dari luas vila itu sudah sesuai protokol kesehatan kurang dari 50 persen, hanya saja belum kegiatan silaturahmi lalu kumpul-kumpul membuat kerumunan.

Pun demikian, Satgas hanya memberikan teguran dan acara pun bubar. Sebelum bubar pun satgas memeriksa kelengkapan proses seperti hanya negatif antigen. "Jadi bukan polemik, mereka memenuhi protokol kesehatan," tambah Ade. ● osm

Turap Rawa Tembaga di Bekasi Selatan Longsor

BEKASI KOTA (IM) - Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan penanganan bencana longsor turap Rawa Tembaga di area Wisata Kuliner Bekasi Selatan, Selasa, (16/2).

Kepala Seksi Darlog BPBD Kota Bekasi, Wiratma mengatakan, penyebab longsor tersebut akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bekasi pada Senin (15/2) dini hari. Longsor mengakibatkan 6 stand warung dan 3 pohon tumbang masuk ke kali Rawa Tembaga.

"Longsor terjadi sekitar pukul 02.00 WIB akibat hujan turun lebat. Kita mendapatkan

informasi dari warga kemudian langsung turun menuju lokasi dan kini sedang dalam penanganan petugas," kata Wiratma dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Selasa (16/2). Sementara itu, Kepala Dinas DBMSDA Kota Bekasi, Arief Maulana mengatakan panjang turap Rawa Tembaga yang longsor sekitar 32 meter dan kedalaman 5,5 meter.

Hal itu disampaikan usai melakukan tinjauan lapangan dan diskusi yang dihadiri Asda II, Kepala DBMSDA, Bidang SDA, Bidang Prasarana PJU dan Taman, UPTD Alat Berat, dan BPBD Kota Bekasi.

Untuk menangani longsor Kali Rawa Tembaga, pihaknya juga telah melakukan langkah tindak lanjut penanganan longsor turap Kali Rawa Tembaga

dengan menurunkan personil untuk mengevakuasi bangunan dan pohon yang tumbang. Kemudian tindak lanjut penanganan diulankan melalui penanganan darurat dan permanen.

Longsor turap disebabkan konstruksi turap sudah berusia 20 tahun sehingga kekuatan konstruksi sudah tidak optimal. Lalu curah hujan tinggi sejak awal 2021, terutama pada tanggal 21, 24 Januari dan 8 Februari.

Di lokasi turap Rawa Tembaga juga terdapat vegetasi pohon besar yang berada di badan konstruksi sehingga ketika pohon tertiuip angin kencang dan akar pohon tidak kuat mengikat struktur tanah, maka pergerakan tersebut mengancam stabilitas turap. ● mdl

Sejumlah Kawasan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur Terendam Banjir

PULOGADUNG (IM) - Hujan deras mengguyur wilayah Jakarta sejak Selasa (16/2) dini hari. Akibatnya, beberapa lokasi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur terendam banjir.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kawasan industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir setinggi 50 sentimeter. Selain membuat arus lalu lintas tersendat, genangan air juga merendam sejumlah pabrik yang berada di kawasan industri Pulogadung.

Cahyono pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan tersebut mengatakan, setiap musim hujan kawasan industri Pulogadung menjadi langganan banjir. Hal itu terjadi lantaran saluran air tidak berfungsi dengan baik.

"Iya di sini mah banjir terus, kan karena ada banyak pabrik terus juga ada pembangunan jalan Tol jadi air engga ngalir," kata Cahyono di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (16/2).

Akibat genangan air tersebut sejumlah pengendara nekad melawan arus lalu lintas untuk menghindari mati mesin. "Kalau hujan terus turun air bakal terus naik," ujarnya.

Pantauan di lokasi banjir tersebut dimanfaatkan sejumlah anak-anak untuk berenang di sekitar kawasan industri Pulogadung yang terendam banjir.

Genangan air juga terlihat Jalan Kramat, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Lokasi tepatnya di depan Jakarta Islamic Center. Genangan air terjadi di jalan arah Cilincing dengan ketinggian 15-25 Cm.

Genangan air juga terjadi di wilayah Pluit, Kecamatan Penjaringan. Genangan terjadi di kawasan pergudangan Pluit ini sempat menghambat kendaraan yang akan melintas.

Banjir juga menggenangi di Jalan Parang Teritis, Ancol dan Jalan Gunung Sahari tepatnya di depan Mangga Dua Square, Kecamatan Pandemangan. Tinggi banjir bervariasi dan juga diakibatkan meluapnya anak Kali Ciliwung.

Berdasarkan pantauan, banjir mulai surut saat menjelang siang hari. Hujan dengan intensitas tinggi masih terus berlangsung dan petugas masih terus melakukan penanganan.

Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan adanya genangan tersebut masih dalam penanganan petugas di lapangan. "Masih dalam proses penanganan petugas," ucapnya. ● osm



IDN/ANTARA

RAKOR PELAKSANAAN PPKM JILID II

Forkopimda Kota Jakarta Selatan menggelar rakor pelaksanaan PPKM Jilid II di Ruang Pola Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (16/2). Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta Selatan menyatukan persepsi dalam melaksanakan Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II diawali melalui kegiatan rapat koordinasi.